

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada ditangan rakyat, rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan umum. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang diantara pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan diantara penyelenggara pemerintahan. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintahan, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan pihak eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas dan ketentuan undang-undang. Pihak eksekutif bertanggungjawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

Secara substansial, terdapat tiga tingkat pemerintahan Republik Indonesia yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat memberikan wewenang dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan militer kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatur pemerintahannya sendiri yang disebut dengan sistem otonomi daerah. Di Indonesia sistem otonomi daerah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004.

Peran penting akuntansi pada pemerintah daerah ditunjukkan dalam pasal 51 UU Nomor 17 tahun 2003 yaitu setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan

transaksi atas keuangan, aset, utang dan ekuitas, termasuk transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang berada dalam tanggungjawabnya. Salah satu aktivitas pemerintah yang dilakukan pada Biro Keuangan Bagian Akuntansi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu sistem dan prosedur pengeluaran kas untuk belanja dan beban, baik dengan pembebanan langsung (LS) maupun dengan pembebanan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/GU/TU). Pembebanan langsung (LS) adalah mekanisme pengeluaran kas untuk belanja dari rekening kas umum daerah secara langsung kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan. Uang Persediaan (UP) merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Transaksi kas dikelompokkan menjadi transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas berasal dari pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, penerimaan pembiayaan, penerimaan transfer dan penerimaan lainnya/nonanggaran. Sedangkan transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh belanja daerah, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transfer dan pengeluaran lainnya/nonanggaran. Di dalam prosedur pengeluaran kas dalam rangka pelaksanaan APBD di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa permasalahan, seperti dana yang dicairkan tidak sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan dan kesalahan pada dokumen yang diajukan SKPD untuk pembayaran suatu kegiatan, dana yang telah cair dan telah digunakan untuk pembayaran terdapat sisa lebih, dana yang telah dianggarkan tidak memenuhi jumlah belanja atau pengeluaran. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir ini dengan judul **“Sistem Pengeluaran Kas Pembebanan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Sistem pengeluaran kas pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari sistem pengeluaran kas pembebanan langsung (LS) dan pembebanan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang(GU) dan Tambahan Uang(TU). Sistem pengeluaran kas pembebanan langsung digunakan untuk mencatat dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Untuk menghasilkan suatu penulisan yang baik maka diperlukan batasan-batasan dalam lingkup pembahasan. Penulisan Tugas Akhir ini dibatasi pada pembahasan sistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan UP/GU/TU. Uang Persediaan (UP) berkaitan dengan dana yang digunakan untuk uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung, Ganti Uang (GU) merupakan dana yang digunakan untuk mengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan Tambahan Uang (TU) merupakan dana yang digunakan sebagai tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penyusunan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan dan kegunaan bagi penulis, pihak Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maupun pihak-pihak lain. Berikut uraian tujuan dan kegunaan penulisan Tugas Akhir ini.

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem pengeluaran kas pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah apakah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Membandingkan teori Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditelah didapatkan selama perkuliahan dengan praktik yang dilakukan di lapangan sehingga menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mahasiswa di lapangan kerja.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penyusunan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dengan menelusuri dan mempelajari data yang diperoleh dari tempat penelitian.
2. Bagi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, masukan untuk menyusun sistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan UP/GU/TU.
3. Bagi pihak-pihak lain, khususnya Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Berikut ini akan disajikan jenis data dan metode pengumpulan data untuk penyusunan Tugas Akhir ini.

1.4.1 Jenis Data

Jenis data menurut sumbernya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Pengertian data primer menurut Umi Narimawati (2008) dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*, adalah data yang berasal dari sumber asli yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian yang didapatkan melalui orang yang dijadikan objek penelitian. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis tidak menggunakan sumber data primer.

2. Data sekunder

Pengertian data sekunder menurut Sugiono (2008) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sifatnya mendukung. Data sekunder dalam penulisan Tugas Akhir ini berupa data mengenai sejarah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dasar hukum,

tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi SETDA, tugas dan wewenang dari masing-masing biro.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang dipakai untuk mengumpulkan data baik itu data primer atau data sekunder, yang didapatkan melalui proses wawancara, studi pustaka maupun observasi dan sebagainya. Pengumpulan data dalam penulisan Tugas Akhir ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Pengertian observasi menurut Arifin (2011) adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan pengamatan secara langsung tentang pengeluaran kas pembebanan UP/GU/TU pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada bagian akuntansi biro keuangan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Metode Wawancara

Menurut Mulyatiningsih (2014) metode wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara lisan. Dalam hal ini dilakukan wawancara secara langsung dengan beberapa pegawai pada bagian akuntansi biro keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan informasi pengeluaran kas pembebanan UP/GU/TU. Data yang diperoleh antara lain informasi tentang pengeluaran kas, peranan masing-masing personel, dan tanggung jawabnya masing-masing.

3. Metode Kepustakaan

Menurut Keraf (2001), menyatakan bahwa studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca atau memanfaatkan buku-buku untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan pendapat ahli dengan menempatkan kesimpulan tersebut sebagai metode tersendiri untuk merumuskan sesuatu pendapat baru yang berikutnya lebih menekankan pengutipan-pengutipan untuk memperkuat uraian. Dalam metode ini data dikumpulkan dengan

menggunakan buku-buku literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem pengeluaran kas serta sumber-sumber yang diperoleh dari perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan Tugas Akhir ini disusun menjadi empat bagian yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan. Pada bagian ini dijelaskan pula tentang bagaimana cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan dalam penyusunan Tugas Akhir.

BAB II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi beberapa hal yang melatarbelakangi sejarah berdirinya, lokasi perusahaan, visi dan misi. Selain itu, pembahasan tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, tugas dan wewenang masing-masing bagian, dasar hukum dan struktur organisasi.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bagian ini menjelaskan beberapa hal tentang pengertian Pengertian sistem dan prosedur, pengertian sistem informasi akuntansi, pengertian sistem akuntansi pemerintah daerah, pengertian sistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan UP/GU/TU, fungsi yang terkait dalam sistem pengeluaran kas pembebanan UP/GU/TU, dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas pembebanan UP/GU/TU, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas

pembebanan UP/GU/TU, jaringan prosedur yang membentuk sistem pengeluaran kas pembebanan UP/GU/TU, *flowchart* sistem pengeluaran kas pembebanan UP/GU/TU.

BAB IV

PENUTUP

Merupakan ringkasan dari pembahasan yang dimuat dalam Bab III tentang Sistem Pengeluaran Kas Pembebanan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) Pada Setda Provinsi Jawa Tengah.